

Stakeholder Role Analysis in Mangrove Ecosystem Management in Lembar Selatan Village, West Lombok

Saiful Islam¹, Ahmad Jupri^{1*}, Isrowati¹, Hilman Ahyadi¹

¹Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Article History

Received : May 16th, 2026

Revised : June 20th, 2026

Accepted : June 26th, 2026

*Corresponding Author:

Ahmad Jupri,

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: jupririzkil@gmail.com

Abstract: Mangrove ecosystems provide ecological and economic services but are increasingly threatened by land conversion, overexploitation, and weak governance coordination. In Lembar Selatan Village, West Lombok, about 57% of the mangrove area has been degraded despite ecotourism-based management initiatives. This study aimed to identify stakeholders and analyze their roles in mangrove ecosystem management. Data were collected through structured in-depth interviews with 14 purposively selected respondents representing government agencies, community groups, tourism actors, academics, and civil society organizations. The interest and influence variables for each stakeholder were measured on a scale of 1 to 5, with the combined total scores categorized into five priority levels. These quantitative outputs were then utilized to analyze stakeholder roles through an interest-influence matrix. The results showed that 14 stakeholders were involved and grouped into three categories. Subjects comprised, fishermen, travel operators, NGOs, MSMEs, the village head, hamlet heads Polairud, West Lombok Marine and Fisheries Office, and KLHK NTB; these actors had high interest but limited influence. Key players included BKSDA NTB, West Lombok Tourism Office, BAPPEDA West Lombok and Pokdarwis. Bystanders consisted of academics. The study indicates that stronger coordination between high-influence institutions and community-based actors is essential to improve sustainable mangrove management in Lembar Selatan.

Keywords: stakeholder role; mangrove ecosystem; ecotourism; Lembar Selatan; coastal management.

Pendahuluan

Hutan mangrove merupakan ekosistem kunci yang memiliki nilai strategis luar biasa. Selain menjadi sumber utama keanekaragaman hayati (Bindiya et al., 2023), hutan mangrove juga menyediakan berbagai barang dan jasa yang mendukung kehidupan komunitas manusia (Santos et al., 2017). Secara ekologis, hutan mangrove memiliki fungsi penting, seperti menjadi daerah pemijahan (*spawning ground*) dan tempat mencari makan (*nursery ground*) bagi berbagai spesies laut (Salahudin et al., 2021). Ekosistem ini juga memberikan layanan budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai signifikan bagi manusia (Friess et al., 2021). Secara ekonomi, ekosistem mangrove berfungsi sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat (potensi Rp320–912 juta/tahun), pusat transisi energi, dan penyedia jasa karbon biru (potensi Rp1,09–3,85 miliar/tahun). Pengembangan seluruh potensi

tersebut memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif demi mencegah kolapsnya ekosistem dalam 15–20 tahun ke depan (Huwaei et al., 2026).

Namun, keberadaan hutan mangrove semakin terancam oleh berbagai aktivitas manusia. Perubahan lahan menjadi faktor utama konversi kawasan mangrove ke area lain yang kurang ramah lingkungan (Richard & Friess, 2015; Surya Perdana, 2012). Kondisi serupa juga terjadi di kawasan mangrove Kecamatan Lembar. Menurut penelitian Sari et al. (2023), sekitar 57% hutan mangrove di Kecamatan Lembar mengalami kerusakan, meliputi area seluas 64,52 hektare. Selain itu, 22% atau 24,51 hektare berada dalam kondisi rusak berat dan hanya 21% atau 24,18 hektare yang tidak rusak. Tingginya laju deforestasi ini sangat erat kaitannya dengan perubahan tutupan lahan (Richard et al., 2020). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder guna

mendorong pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kawasan hutan mangrove di Lembar Selatan mencakup luas 70 hektare yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pariwisata. Pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bersama masyarakat setempat. Sejak tahun 2000, masyarakat telah memanfaatkan kawasan mangrove untuk budidaya kepiting bakau. Sebelumnya, kawasan ini digunakan untuk tambak garam (Al Idrus et al., 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat juga mulai mengembangkan kegiatan ekowisata mangrove, seperti membuka usaha kuliner khas Sasak, menyewakan perahu wisata, menyediakan jasa parkir, hingga menjual tiket masuk (Salimah et al., 2021).

Pengelolaan ini masih belum berjalan optimal. Konflik kepentingan, seperti konversi lahan dan eksploitasi sumber daya mangrove, menjadi tantangan utama (Maiti et al., 2013). Konversi lahan sering terjadi dalam bentuk alih fungsi mangrove menjadi tambak garam, lahan pertanian, permukiman, atau perkebunan. Selain itu, eksploitasi dilakukan dengan memanfaatkan kayu mangrove untuk bahan konstruksi, patok budidaya, atau perangkap ikan. Konflik ini melibatkan berbagai pihak dan sering kali menimbulkan kerugian kolektif (Soontornwong, 2006).

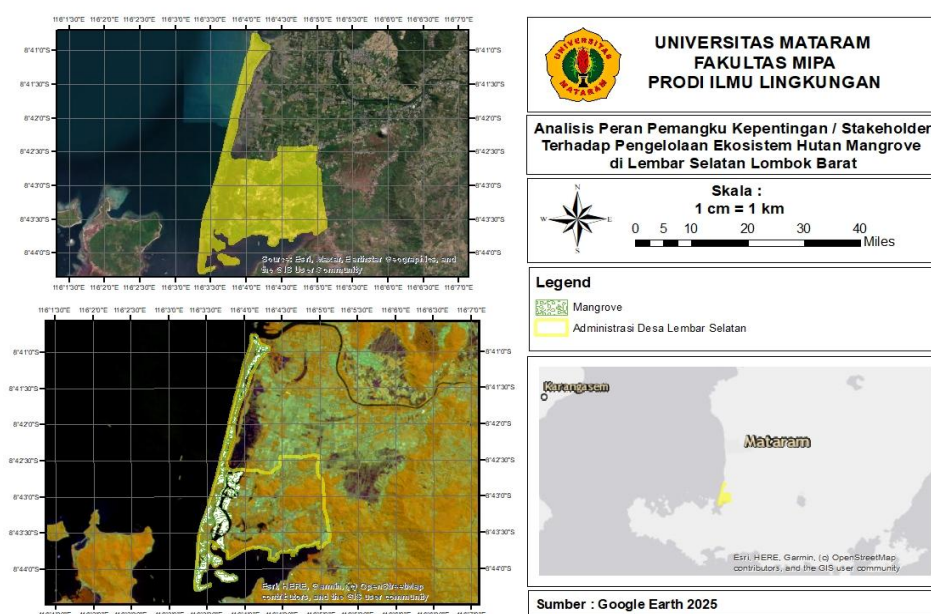
Upaya memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan, kolaborasi seluruh stakeholder perlu

dilakuak. Dahuri (2001) menekankan pentingnya peran antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Harahap (2009) juga menyatakan bahwa pengelolaan yang melibatkan seluruh elemen stakeholder dapat mencegah kerusakan mangrove. Partisipasi aktif stakeholder merupakan kunci keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan (Hasnanda, 2018). Namun, kebijakan yang tidak terintegrasi sering memunculkan konflik antarpemangku kepentingan yang menghambat pengelolaan (Reed et al., 2009). Penelitian terdahulu terkait analisis stakeholder lebih banyak memetakan Lembaga atau instansi formal. Keterbaharuan dari penelitian ini penambahan kelompok lokal sebagai salah satu stakeholder, sehingga pemetaan lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder dan menganalisis perannya dalam pengelolaan hutan mangrove di Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat.

Bahan dan Metode

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu September–Oktober 2024, di kawasan Ekowisata Mangrove Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi penelitian di kawasan hutan mangrove Desa Lembar Selatan, Lombok Barat (sumber: peneliti)

Metode Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pensil untuk mencatat, kertas sebagai media tulis, dan kamera untuk dokumentasi. Bahan yang digunakan meliputi lembar panduan wawancara untuk stakeholder. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data adalah Microsoft Excel.

Pengambilan sampel narasumber dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria lembaga atau instansi yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan mangrove di Lembar Selatan. Jumlah narasumber ada 14 narasumber. Setiap stakeholder diwakili oleh 1 narasumber yang memiliki kriteria pengetahuan yang mendalam/bergerak dalam bidang tersebut, keterlibatan langsung dan mengambil perwakilan yang memiliki kedudukan posisi strategis (posisi tertinggi). Pengambilan narasumber dengan kriteria tersebut dianggap sudah mampu mewakili pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder. Prosedur persetujuan informan melalui beberapa tahap, antara lain mengajukan surat permohonan secara resmi ke kepala stakeholder terkait, stakeholder mengatur jadwal wawancara, sebelum dilakukan wawancara dilakukan penjelasan secara lisan terkait tujuan penelitian dan tahap terakhir narasumber memberikan persetujuan untuk pengambilan data

Analisis peran stakeholder dilakukan dengan memetakan tiap stakeholder ke dalam matriks berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Jawaban wawancara dari informan dikonversi menjadi data kuantitatif dengan melakukan skoring (skala likert 1-5). Instrumen dan dasar pembobotan penilaian kuantitatif kepentingan dan pengaruh mengadopsi instrumen dari yang telah dimodifikasi oleh Muqorrobin et

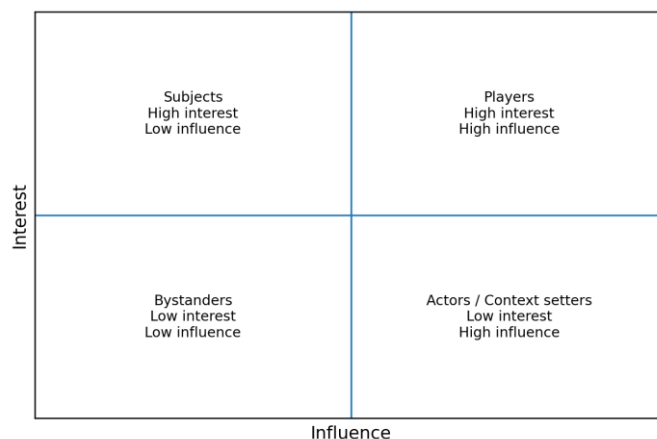
al., (2013). Variabel kepentingan terdiri dari 4 variabel yaitu keterlibatan, manfaat pengelolaan, prioritas pengelolaan dan ketergantungan terhadap sumberdaya. Variabel untuk pengaruh stakeholder terdiri dari aturan/kebijakan pengelolaan, peran dan partisipasi, kewenangan dalam pengelolaan dan kapasitas sumberdaya yang disediakan. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan indikator operasional yang dinilai menggunakan skala skor 1 sampai 5. Proses penetapan indikator beserta bobot skor pada masing-masing variabel tersebut telah melalui tahap validasi oleh ahli materi.

Hasil skoring pada tingkat kepentingan dan pengaruh pada setiap variabel diakumulasikan dan dikriteriakan menjadi data berjenjang 5 sesuai model yang dikembangkan oleh Abbas (2025) yang dimodifikasi oleh Muqorrobin et al., (2013). Tabel Tingkat pengaruh dan kepentingan tersaji pada Tabel 1.

Total skor tingkat kepentingan dan pengaruh pada setiap stakeholder ditransformasikan ke skala 1-5 untuk. Selanjutnya sandingkan untuk membentuk koordinat dua dimensi (X dan Y dengan memanfaatkan visualisasi grafik *scatter plot* pada Microsoft Excel. Koordinat ini dipetakan ke dalam diagram kartesius berskala 5. Penentuan posisi strategis aktor didasarkan pada letak koordinat tersebut terhadap garis pembatas kuadran. Pengelompokan peran stakeholder terdiri atas Subjects (kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah), Players (kepentingan dan pengaruh tinggi), Actors/Context Setters (kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi), dan Bystanders (kepentingan dan pengaruh rendah) (Reed et al., 2009). Model pengelompokan tersebut disajikan pada Gambar 2.

Tabel 1. Kriteria tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

Kriteria	Nilai	Keterangan tingkat kepentingan
Sangat tinggi	17-20	Sangat bergantung pada keberadaan mangrove
Tinggi	13-16	bergantung pada mangrove
Sedang	9-12	Cukup bergantung pada keberadaan mangrove
Cukup tinggi	5-8	kurang bergantung pada keberadaan mangrove
Rendah	0-4	Tidak bergantung terhadap keberadaan sumber daya



Gambar 2. Model stakeholder grid berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 14 stakeholder yang berperan dalam pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat. Stakeholder tersebut terdiri atas: 1) BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Lombok Barat; 2) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nusa Tenggara Barat; 3) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB; 4) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat; 5) Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok

Barat; 6) Kepala Desa Lembar Selatan; 7) Kepala Dusun Cemare; 8) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 9) travel wisata; 10) akademisi; 11) kelompok nelayan; 12) Polisi Air dan Udara (Polairud); 13) UMKM; dan 14) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Berdasarkan penilaian kuantitatif terhadap pengaruh dan kepentingan, diperoleh tingkat kriteria masing-masing stakeholder. Kriteria tingkat kepentingan disajikan pada Tabel 4, sedangkan kriteria tingkat pengaruh disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Kriteria tingkat kepentingan stakeholder

No	Stakeholder	K1	K2	K3	K4	Total	Kriteria
1	BAPPEDA Lombok Barat	3	2	4	3	12	Sedang
2	KLHK NTB	3	4	4	3	14	Tinggi
3	BKSDA NTB	4	4	5	4	17	Sangat Tinggi
4	DKP Lombok Barat	2	3	5	5	15	Tinggi
5	Dispar Lombok Barat	2	3	5	5	15	Tinggi
6	Kepala Desa Lembar Selatan	2	3	3	2	10	Sedang
7	Kepala Dusun Cemare	3	3	3	5	14	Tinggi
8	LSM	2	4	5	5	16	Tinggi
9	Travel wisata	2	3	2	4	11	Sedang
10	Akademisi	1	1	1	1	4	Rendah
11	Kelompok nelayan	2	2	3	3	10	Sedang
12	Polairud	3	3	5	2	13	Tinggi
13	UMKM	2	3	5	3	13	Tinggi
14	Pokdarwis	2	2	5	4	13	Tinggi

Keterangan: K1 = keterlibatan; K2 = manfaat pengelolaan; K3 = prioritas pengelolaan; K4 = ketergantungan terhadap sumber daya.

Tabel 5. Kriteria tingkat pengaruh stakeholder

No	Stakeholder	P1	P2	P3	P4	Total	Kriteria
1	BAPPEDA Lombok Barat	4	3	4	4	15	Tinggi
2	KLHK NTB	3	2	2	2	9	Sedang
3	BKSDA NTB	4	4	3	2	13	Tinggi
4	DKP Lombok Barat	1	4	1	3	9	Sedang

No	Stakeholder	P1	P2	P3	P4	Total	Kriteria
5	Dispar Lombok Barat	2	5	3	2	12	Sedang
6	Kepala Desa Lembar Selatan	1	2	1	2	6	Cukup Tinggi
7	Kepala Dusun Cemare	2	2	2	2	8	Cukup Tinggi
8	LSM	2	2	2	2	8	Cukup tinggi
9	Travel wisata	2	2	1	1	6	Cukup Tinggi
10	Akademisi	1	1	1	2	5	Cukup Tinggi
11	Kelompok nelayan	1	2	1	1	5	Cukup Tinggi
12	Polairud	1	1	1	2	5	Cukup Tinggi
13	UMKM	1	2	2	2	7	Cukup tinggi
14	Pokdarwis	3	4	1	3	11	Sedang

Keterangan: P1 = aturan dan kebijakan; P2 = peran dan partisipasi; P3 = kewenangan pengelolaan; P4 = kapasitas sumber daya manusia.

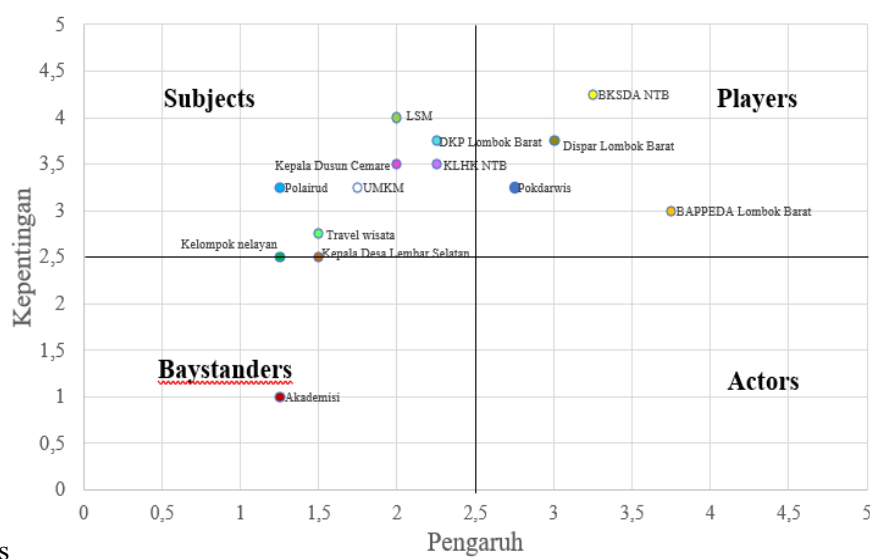
Berdasarkan analisis tingkat kepentingan, terdapat satu stakeholder dengan tingkat kepentingan sangat tinggi, yaitu BKSDA NTB, dan satu stakeholder dengan kepentingan rendah, yaitu akademisi. Kelompok stakeholder dengan kriteria tinggi terdiri atas KLHK NTB, DKP Lombok Barat, Dispar Lombok Barat, Polairud, Kepala Dusun Cemare, LSM, UMKM, dan Pokdarwis. Sementara itu, stakeholder dengan kriteria sedang terdiri atas BAPPEDA, Kepala Desa Lembar Selatan, travel wisata, dan kelompok nelayan.

Berdasarkan analisis tingkat pengaruh, kelompok stakeholder dengan kriteria tinggi terdiri atas BAPPEDA Lombok Barat, BKSDA NTB, dan Dispar Lombok Barat. Sementara itu, beberapa stakeholder lain berada pada kriteria cukup tinggi atau sedang sesuai peran, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dengan kriteria sedang terdiri dari 4

yaitu KLHK NTB, DKP Lombok Barat, UMKM dan Pokdarwis. Stakeholder yang memiliki kriteria pengaruh cukup tinggi terdiri dari 7 stakeholder.

Peran Stakeholder

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat empat kategori peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan, yaitu Subjects, Players, Bystanders, dan Actors. Kelompok Subjects terdiri atas Pokdarwis, Kepala Desa Lembar Selatan, Kepala Dusun Cemare, akademisi, kelompok nelayan, dan travel wisata. Kelompok Players terdiri atas KLHK NTB, Dispar Lombok Barat, BKSDA NTB, DKP Lombok Barat, dan Polairud. Kelompok Bystanders terdiri atas UMKM dan LSM. Sementara itu, BAPPEDA Lombok Barat berperan sebagai Actor atau Context Setter. Grid peran stakeholder disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Grid peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan.

Pembahasan

Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

1. BAPPEDA Lombok Barat berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah, perumusan regulasi konservasi, pengembangan basis data mangrove, serta penyusunan rencana zonasi pesisir Teluk Lembar. BAPPEDA memiliki pengaruh tinggi karena menyusun dokumen perencanaan daerah dan berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan kawasan ekosistem mangrove. Namun, kepentingannya tergolong sedang karena peran teknis lapangan relatif terbatas.
2. KLHK NTB berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Keterlibatan KLHK NTB mendukung keseimbangan ekosistem, mitigasi bencana, dan edukasi konservasi.
3. BKSDA NTB memiliki tingkat kepentingan sangat tinggi karena bertanggung jawab dalam pengendalian, pemantauan, pengawasan konservasi, serta perlindungan ekosistem mangrove. Selain itu, BKSDA memiliki kewenangan regulatif dalam pelaksanaan kebijakan konservasi.
4. DKP Lombok Barat memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan ekosistem mangrove. DKP bekerja secara teknis dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan kawasan, penyusunan regulasi konservasi, penegakan hukum lingkungan, serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
5. Dispar Lombok Barat terlibat dalam promosi ekowisata berbasis mangrove untuk mendukung sektor pariwisata, meningkatkan daya tarik wisata alam, dan memberikan dampak ekonomi lokal. Dispar berperan dalam strategi pengembangan ekowisata mangrove, meskipun kewenangan langsung terhadap pengelolaan kawasan terbatas.
6. Polairud memiliki kepentingan sedang karena kawasan mangrove berkaitan dengan kegiatan perikanan dan aktivitas masyarakat pesisir. Polairud memiliki pengaruh dalam pengawasan melalui patroli laut serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian mangrove.
7. Kepala Desa Lembar Selatan memiliki peran dalam pengawasan, penegakan aturan berbasis desa, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah desa dapat mengembangkan regulasi pengelolaan wisata berbasis lingkungan dan berkolaborasi dengan dinas terkait dalam penyusunan peraturan desa.
8. Kepala Dusun Cemare memiliki kepentingan dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan ekowisata mangrove, terutama karena kawasan mangrove berfungsi melindungi desa dari abrasi dan mendukung ekonomi lokal. Namun, pengaruhnya masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan regulatif langsung.
9. LSM memiliki kepentingan dalam pengelolaan mangrove melalui koordinasi masyarakat, advokasi, edukasi lingkungan, dan dukungan program konservasi. Perannya penting dalam mendorong partisipasi publik, meskipun pengaruh formal terhadap kebijakan relatif terbatas.
10. Travel wisata memiliki kepentingan dalam program edukasi dan konservasi berbasis masyarakat serta memanfaatkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata. Namun, pengaruhnya tergolong sedang karena tidak memiliki kewenangan langsung dalam regulasi dan kebijakan.
11. Akademisi berperan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan rekomendasi ilmiah. Akademisi memiliki kepentingan terhadap keberhasilan program, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan.
12. Kelompok nelayan merupakan kelompok yang memiliki ketergantungan langsung pada kawasan ekosistem mangrove. Nelayan menerima dampak langsung dari kebijakan dan program pengelolaan, tetapi kapasitas untuk memengaruhi kebijakan masih terbatas.
13. UMKM memiliki kepentingan karena memanfaatkan hasil mangrove untuk produk ekonomi lokal, seperti olahan pangan atau kerajinan. Namun, UMKM tidak memiliki kewenangan langsung, sehingga pengaruhnya lebih banyak berada pada dukungan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
14. Pokdarwis terlibat dalam kegiatan ekowisata dan edukasi konservasi sehingga memiliki kepentingan tinggi. Pokdarwis mendukung pariwisata lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi kewenangan formal dalam pengelolaan kawasan masih terbatas.

Peran Stakeholder

Kategori Players mencakup pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam pengelolaan ekosistem

mangrove. Beberapa pihak dalam kategori ini adalah BKSDA NTB, Dispar Lombok Barat, Pokdarwis dan BAPPEDA Lombok Barat. Kelompok ini perlu menjadi motor koordinasi karena memiliki otoritas, sumber daya, serta legitimasi formal dalam pengelolaan kawasan pesisir dan konservasi mangrove. BAPPEDA Lombok Barat termasuk dalam kategori ini karena berperan dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah, termasuk tata ruang dan zonasi pesisir yang berkelanjutan. Pokdarwis secara intensif terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan

Kategori Subjects terdiri atas pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap ekosistem mangrove, tetapi pengaruhnya masih terbatas. Kelompok ini mencakup kelompok nelayan, travel wisata, Kepala Desa Lembar Selatan, Kepala Dusun Cemare, DKP Lombok Barat, KLHK NTB, Polairud, LSM dan UMKM. LSM berperan dalam advokasi lingkungan, edukasi masyarakat, dan rehabilitasi mangrove, sedangkan UMKM berkontribusi melalui pemanfaatan sumber daya mangrove untuk produk ekonomi lokal. Kelompok ini perlu terus dilibatkan dalam proses pengelolaan karena memiliki hubungan langsung dengan ekosistem dan kegiatan sosial-ekonomi di sekitarnya.

Kategori Bystanders terdiri atas pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih rendah, tetapi tetap dapat berkontribusi dalam mendukung program konservasi. Akademisi berperan dalam penelitian, edukasi masyarakat, dan rehabilitasi mangrove.

Key player memiliki peran dalam mengambil Keputusan dan mengimplementasikan dari setiap regulasi yang ada. Keberhasilan pengelolaan perlu adanya koordinasi dengan kelompok subject. Koordinasi yang dilakukan keyplayer dan subject dapat dilakukan dengan mekanisme dialog untuk memperoleh aspirasi dari masyarakat lokal dalam upaya merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan mangrove. Pengelolaan kolaboratif dapat meminimalisir konflik antar stakeholder. Sejalan dengan Begum et al., (2023) bahwa pengelolaan kolaboratif merupakan salah satu pengelolaan yang menjembatani antara masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah sehingga membentuk kemitraan dalam pengelolaan secara berkelanjutan.

Bappeda memiliki fungsi koordinatif dalam menyeleraskan kepentingan dengan key

player lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, Bappeda memiliki peran dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam mengarahkan perencanaan pembangunan daerah melalui dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berdasarkan dokumen RPJMD, setiap program dan kepentingan dari stakeholder dapat terakomodasi dengan baik.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan juga didukung oleh berbagai regulasi nasional dan daerah yang mengatur konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjadi dasar landasan dan kewenangan dari BKSDA yang berperan dalam melaksanakan perlindungan, pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ekosistem Mangrove (RAN-KEM) 2017-2027 menjadi dasar kewenangan untuk KLHK, BKSDA NTB, BAPPEDA dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan kawasan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat menjadi dasar landasan kewenangan menjadi dasar bagi BAPPEDA Lombok Barat, DKP Lombok Barat, Dinas Pariwisata Lombok Barat, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove perlindungan lingkungan, serta pengawasan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan konservasi mangrove dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan melibatkan 14 stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh berbeda. Berdasarkan hasil pemetaan peran, terdapat sembilan stakeholder sebagai Subjects, yaitu kelompok nelayan, travel wisata, Kepala Desa Lembar Selatan, Kepala Dusun Cemare, DKP Lombok Barat, KLHK NTB, Polairud, LSM dan UMKM. Empat stakeholder berperan

sebagai Players, BKSDA NTB, Dispar Lombok Barat, Pokdarwis dan BAPPEDA Lombok Barat. Satu stakeholder yaitu Akademisi berada pada kategori Bystanders, Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antara stakeholder berpengaruh tinggi dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung menjadi prasyarat penting bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Perlu adanya pembentukan forum bersama yang antar stakeholder.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan bantuan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang mendukung kelancaran penelitian dan Universitas Mataram sehingga penelitian terlaksana dengan baik.

Referensi

- Abbas, R. (2005). Mekanisme perencanaan partisipasi stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor.
- Al Idrus, A., Ilhamdi, M. L., Hadiprayitno, G., & Mertha, G. (2018). Sosialisasi peran dan fungsi mangrove pada masyarakat di kawasan Gili Sulat Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(1), 52-59.
- Begum, F., de Bruyn, L. L., Kristiansen, P., & Islam, M. A. (2023). Development pathways for co-management in the Sundarban mangrove forest: A multiple stakeholder perspective. *Forest Policy and Economics*, 148, 102918. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102918>
- Bindiya, E. S., Sreekanth, P. M., & Bhat, S. G. (2023). Conservation and management of mangrove ecosystem in diverse perspectives. Dalam S. T. Sukumaran & T. R. Keerthi (Eds.), *Conservation and sustainable utilization of bioresources* (hlm. 323-352). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5841-0_13
- Dahlan, M., & Satria, A. (2020). Analisis stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 189-201. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.8942>
- Dahuri, R. (2001). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (edisi revisi). PT Pradnya Paramita.
- Dewi, N. P., Rochana, E., Damai, A. A., Hartoyo, H., Riantini, M., Febryano, I. G., & Tresiana, N. (2024). Pemetaan stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang, Kota Bandar Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*, 7(2), 97-104. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v7i2.5001>
- Friess, D. A., Yando, E. S., Alemu, J. B., Wong, L. W., Soto, S. D., & Bhatia, N. (2020). Ecosystem services and disservices of mangrove forests and salt marshes. *Oceanography and Marine Biology*, 58, 107-142. <https://doi.org/10.1201/9780429351495-3>
- Golebie, E. J., Aczel, M., Bukoski, J. J., Chau, S., Ramirez-Bullon, N., Gong, M., & Teller, N. (2022). A qualitative systematic review of governance principles for mangrove conservation. *Conservation Biology*, 36(1), e13850. <https://doi.org/10.1111/cobi.13850>
- Harahap, N. (2010). Penilaian ekonomi ekosistem hutan mangrove dan aplikasinya dalam perencanaan wilayah pesisir. Graha Ilmu.
- Hasnanda, O. K., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in Region 3 of Aceh Province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(3), 156-156. <https://doi.org/10.7226/jfmr.24.3.156>
- Kismartini, K., Roziqin, A., & Authori, N. (2023). A stakeholder analysis for sustainable development of Maritime Village in coastal community, Indonesia. *Public Administration and Policy*, 26(3), 321-334. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2023-0062>
- Maiti, S. K., & Chowdhury, A. (2013). Effects of anthropogenic pollution on mangrove biodiversity: A review. *Journal of Environmental Protection*, 4(12), 1428-1434. <https://doi.org/10.4236/jep.2013.412163>

- Maryani, R., & Purnomo, H. (2021). Peran dan pengaruh pemangku kepentingan dalam tata kelola hutan mangrove berbasis masyarakat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 18(1), 45-58. <https://doi.org/10.20886/jphka.2021.18.1.45-58>
- Muqorrobin, A., Yulianda, F., & Kodiran, T. (2013). Co-management mangrove ecosystem in the Pasarbanggi Village, Rembang District, Central Java. *International Journal of Bonorowo Wetlands*, 3(2), 114-131. <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w030205>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Richards, D. R., & Friess, D. A. (2015). Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(2), 344-349. <https://doi.org/10.1073/pnas.1510272113>
- Santos, H. V. S., Hollanda, F. S. R., Santos, T. D. O., Andrade, K. V. S. D., Santana, M. B. S., Estrada, G. C. D., & Soares, M. L. G. (2017). Allometric models for estimating the aboveground biomass of the mangrove *Rhizophora mangle*. *Brazilian Journal of Oceanography*, 65(1), 44-53. <https://doi.org/10.1590/S1679-87592017128206501>
- Salimah, A., Setyawan, A. D., & Susilowati, A. (2021). Keanekaragaman hayati dan analisis vegetasi mangrove di kawasan pesisir utara Jawa Tengah. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(3), 412-421. <https://doi.org/10.29244/jpsl.11.3.412-421>
- Sari, D. P., Idris, M. H., & Aji, I. M. L. (2022). Tingkat kerusakan kawasan mangrove di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Forest Science Avicennia*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.22219/avicennia.v5i1.20038>
- Sari, D. P., Idris, M. H., Anwar, H., & Aji, I. M. L. (2023). Analisis vegetasi mangrove di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. *Empiricism Journal*, 4(1), 101-109. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1091>
- Salahuddin, M. A. A., Rohayani, I. S., & Candri, D. A. (2021). Species diversity of birds as bioindicators for mangroves damage at Special Economic Zones (SEZ) Mandalika in Central of Lombok, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 913(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/913/1/012058>
- Savitri, A., & Nugroho, B. (2022). Stakeholder mapping in coastal resource management: Application of power-interest matrix. *Journal of Coastal Development*, 25(3), 112-124. <https://doi.org/10.14710/jcd.25.3.112-124>
- Wiyono, E. (2009). Analisis karakteristik ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kabupaten daerah tingkat II Cilacap. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 16(1), 45-51.